

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas wilayah 9,8 juta km per segi sedangkan luas wilayah lautnya 5,8 juta km per segi, dan tersusun dari tujuh belas ribuan pulau-pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke.¹ Menurut koreksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2008, Indonesia merupakan negara berpantai terpanjang keempat di dunia setelah Amerika Serikat (AS), Kanada dan Rusia. Panjang garis pantai Indonesia tercatat sebesar 95.181 km. Posisi Indonesia yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan diantara dua samudera (Pasifik dan Hindia) menjadikan Indonesia sebagai negara dengan posisi yang amat strategis baik secara ekonomi maupun pertahanan. Seusai dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, disebutkan bahwa pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Kekuatan militer merupakan faktor penting dalam melihat kekuatan suatu negara. Pada dasarnya kekuatan militer digunakan untuk melindungi dan menjaga keamanan negara. Kekuatan militer yang dimiliki oleh suatu negara akan menentukan kekuatan politik negara tersebut.² Sebagai contoh dalam permasalahan keamanan nasional, dalam hal tersebut terdapat kendala-kendala strategis yang dialami Indonesia untuk menanggulangi ancaman dari luar maupun dari dalam negeri seperti minimnya alat utama sistem senjata (ALUTSISTA) yang dimiliki Indonesia, baik yang dimiliki masing-masing

¹ MABES AL “Karakter Perairan Indonesia”

² Griffith, M., 2007, *International Relation Theories for the Twenty-First Centuries*, Routledge, New York, hlm.65.

institusi angkatan perang maupun kemampuan perang dari alat pertahanan tersebut yang belum bisa menjangkau seluruh keamanan wilayah Indonesia.

Kepentingan pertahanan negara yang bersifat tetap adalah penyelenggaraan usaha pertahanan negara untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan dan kehormatan bangsa dari setiap ancaman, baik yang berasal dari luar maupun yang timbul dalam negeri. Pemenuhan kebutuhan kekuatan militer negara mempunyai beberapa cara, yaitu secara mandiri sampai dengan melakukan kerjasama. Indonesia merupakan negara yang melakukan kerja sama militer dengan negara-negara di dunia seperti Amerika Serikat, China, Eropa dan Rusia. Fenomena yang menarik untuk dikaji adalah kerja sama antara Indonesia dengan Rusia.

Kerja sama militer Indonesia dengan Rusia mempunyai sejarah yang panjang. Sejak awal kemerdekaan Indonesia telah memiliki hubungan kerjasama militer dengan Uni Soviet. Indonesia diberikan bantuan dana oleh Uni Soviet yang bertujuan untuk memordenisasi persenjataan bagi Tentara Nasional Indonesi (TNI) dan juga pelatihan teknisnya³. Hubungan kerjasama ini justru memburuk pada tahun 1965 akibat peristiwa G30S/PKI dan pada akhirnya menyebabkan kerjasama militer Indonesia dengan Rusia terputus.⁴ Namun, pada April 2003 kembali menjadi titik awal kembali terjalinnya hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Rusia. Presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri melakukan kunjungan resmi ke Rusia untuk pertama kalinya. Dalam kesempatan tersebut kedua kepala negara menandatangani deklarasi kerangka

³ Nurak, A.P.N., Dhamlasih, W., & Nugraha, A.A.B.S.W.N (2003). *Pengaruh Embargo Senjata AS terhadap Kerja Sama Teknik Militer RI-Rusia*. hlm.14.

⁴ Lebang, T., 2010, *Sahabat Lama Era Baru:60 Tahun Pasang Surut Hubungan Indonesia-Rusia*, Grasindo, Jakarta, hlm.32.

hubungan persahabatan dan kemitraan antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia dalam abad ke 21.⁵

Perkembangan hubungan kerjasama militer Indonesia dengan Rusia semakin terlihat erat setelah terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden Indonesia pada bulan September 2004, membuat perjanjian perlindungan terhadap informasi rahasia, yang pertukarannya dilakukan dalam bidang militer dan teknik atau kerjasama lainnya, serta informasi rahasia. Pada 6 September 2007, Presiden Putin mengadakan kunjungan resmi ke Indonesia untuk mengkaji ulang hubungan kerjasama Indonesia dengan Rusia. Kunjungan ini menghasilkan delapan MoU. Salah satu perjanjian internasional di bidang militer pada masa pemerintahan SBY pada kurun waktu 2004-2009 antara Indonesia dan Rusia adalah Peningkatan Kerjasama Bilateral di Bidang Pertahanan dan Keamanan.⁶ Hal ini merupakan kelanjutan sekaligus perluasan agenda kerjasama antara Indonesia dengan Rusia.

Kerjasama pertahanan dengan negara-negara lain, diletakkan diatas prinsip-prinsip kerjasama luar negeri pemerintah Indonesia, serta diarahkan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan sektor pertahanan negara, maupun untuk tujuan menciptakan stabilitas keamanan kawasan regional dan dunia. Keterlibatan sektor pertahanan secara fisik tersebut dilaksanakan atas keputusan politik pemerintah.

Hubungan Indonesia dengan Rusia tidak hanya terbatas pada hubungan antar politikus, pejabat negara,

⁵ Kementerian Luar Negeri (2015). *Deklarasi Kerangka Hubungan Persahabatan dan Kerjasama Antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia dalam Abad ke-21*. Diakses pada 14 Mei 2016, tersedia http://treaty.kemenlu.go.id/uploads-pub/1871_RUS-2003-0013.pdf Lebang, T. Op.Cit. hlm.47.

⁶ Departemen Luar Negeri RI, “Daftar Perjanjian Internasional Rusia-Indonesia”, diakses dari: www.deplu.go.id. Di akses pada tanggal 5 Nopember 2018.

namun juga pada tataran hubungan dengan masyarakat sipil. Banyak warga negara Indonesia yang belajar di perguruan tinggi di Rusia. Namun, kerjasama tehnik militer alat utama sistem senjata (ALUTSISTA) Indonesia dengan Rusia merupakan suatu upaya Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional yakni untuk meningkatkan kapabilitas militer, pertahanan dan keamanan Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: “Kerjasama Indonesia-Rusia dalam bidang militer dan upaya peningkatan pengadaan alat utama sistem senjata (ALUTSISTA)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan satu rumusan masalah, yakni “Mengapa Indonesia kembali melakukan kerja sama militer dengan Rusia dalam upaya peningkatan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (ALUTSISTA)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dengan diadakannya penelitian tentang kerjasama Indonesia-Rusia dalam bidang militer dan upaya peningkatan pengadaan alat utama sistem senjata (ALUTSISTA) yaitu:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan kerjasama Indonesia terhadap Rusia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana peningkatan pengadaan alat utama sistem senjata (ALUTSISTA) Indonesia.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis arah kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam bidang pertahanan militer.

Sedangkan manfaat yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini ada 3 yaitu pribadi, akademis dan masyarakat:

1. Untuk pribadi:
 - a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu di Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
 - b. Sebagai sarana penulis untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama di bangku perkuliahan.
 - c. Untuk menambah pemahaman dan wawasan dalam politik luar negeri Indonesia dan gejolak politik dalam tatanan globalisasi.
2. Akademis
 - a. Sebagai wujud pengembangan konsep-konsep teoritis dalam politik Internasional.
 - b. Sebagai bahas kajian dalam politik internasional Indonesia khususnya studi percaturan politik globalisasi
3. Masyarakat
 - a. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat tentang pertahanan militer Indonesia dalam menghadapi politik percaturan globalisasi yang semakin menantang.
 - b. Sebagai bahan diskusi bagi masyarakat khususnya tentang arah kebijakan politik luar negeri Indonesia.
 - c. Sebagai bahan referensi bagi masyarakat yang berminat dalam mengkaji dan menelaah tentang pertahanan militer dalam tatanan internasional.

D. Kerangka Dasar Teori

Teori ini merupakan konsep-konsep yang saling berhubungan menurut aturan logika yang menjadi suatu pernyataan dan dapat mengidentifikasi pokok permasalahan. Sebelum menguraikan teori yang dipakai untuk menganalisa permasalahan yang ada, lebih dulu akan diuraikan apa yang disebut teori. Teori adalah bentuk penjelasan paling umum yang memberitahukan

kepada kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu itu terjadi, dengan demikian selain dipakai untuk eksplanasi, teori juga menjadi dasar prediksi. Teori bisa dikatakan sebagai suatu pandangan atau persepsi mengenai sesuatu yang terjadi dan akan terjadi. Sedangkan, konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu atau fenomena tertentu. Untuk menganalisa permasalahan yang ada, penulis menggunakan teori sebagai berikut:

a. Model Aktor Rasional (Graham T. Allison)

Dalam mendefinisikan rasionalitas, Allison Graham menyatakan bahwa “*consistent, value-maximizing choice within specified constraints*”, rasionalitas mengacu pada pilihan pemaksimalan nilai yang konsisten dalam batasan yang ditunjukkan.⁷ Mintz menjelaskan aktor rasional juga dapat mengidentifikasi alternatif dan konsekuensinya, untuk memilih dari alternatif dalam upaya untuk memaksimalkan kepuasan.⁸ Model aktor rasional dari pengambilan keputusan adalah proses untuk memilih pilihan yang tepat untuk mencapai "tujuan nasional" dengan menganalisis semua kemungkinan alternatif dan konsekuensinya. Pembuatan keputusan rasional adalah kemampuan untuk menghubungkan sarana untuk mencapai tujuan atau kepentingan nasional. Sehingga, Setiap negara digambarkan sebagai aktor rasional yang selalu bertindak didasarkan atas kepentingan dirinya sendiri. Dan yang paling mendasar adalah menjaga kedaulatan dan mencapai kepentingan nasional. Para pembuat keputusan melakukan alternatif alternatif kebijakan untuk mendapatkan hasil yang optimal.⁹ Model ini menyatakan

⁷ Alex Mintz dan Karl Derouen, 2010, “Understanding Foreign Policy Decision Making”, Cambridge University Press. 57

⁸ Ibid, 57

⁹ Allison, Graham T.1971. *Essence of Decision : Explaining the Cuban Missile Crisis*. Boston: Little, Brown and Company. Dalam Hara, A

bahwa keputusan yang dibuat merupakan suatu pilihan rasional yang telah didasarkan pada pertimbangan rasional/intelektual dan kalkulasi untung rugi sehingga diyakini menghasilkan keputusan yang matang, tepat, dan prudent.

Dalam model aktor rasional, negara digambarkan sebagai aktor individu rasional, memiliki pengetahuan untuk memaksimalkan nilai dan tujuannya sehingga mengambil keputusan berdasarkan suatu situasi yang ada. Berbagai tindakan negara-negara dianalisis dengan asumsi bahwa negara-negara mempertimbangkan semua pilihan dan bertindak rasional untuk memaksimalkan keuntungan. Greg Cashman beberapa tahap dalam model ini yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. Mengidentifikasi masalah
2. Mengidentifikasi tujuan
3. Mengumpulkan informasi
4. Mengidentifikasi pilihan-pilihan (*alternative*)
5. Menganalisis *alternative* berdasarkan konsekuensi dan keuntungan (*cost-benefit*)
6. Memilih *alternative* dan memaksimalkan peluang.
7. Implementasi
8. Evaluasi dan monitoring

Tujuan politik luar negeri Indonesia dalam membangun kerjasama internasional dalam bidang pertahanan adalah menjadikan Indonesia negara maju dalam pertahanan dan militer sehingga dalam pelaksanaannya cenderung melaksanakan penguatan nasional. Penguatan nasional yang dimaksud adalah dengan meningkatkan profesionalisme personel, pengamanan wilayah pembatasan pulau terdepan dan

Eby. 2011. Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: dari Realisme sampai Konstruktivisme. Bandung: Nuansa.

¹⁰ *Op.Cit* Mintz 57

terluar, dan yang terakhir untuk memodernisasi alutsista atau non alutsista atau sarana dan prasarana.

Untuk mencapai penguatan nasional pemerintah Indonesia melaksanakan strategi pembangunan nasional dibidang pertahanan melalui MEF (*Minimum Essential Force*). MEF merupakan suatu strandar kekuatan pokok minimum sebagai postur pertahanan yang ideal serta memiliki efek tangkal.¹¹ Pemerintah Indonesia melihat sasaran strategis MEF ditujukan pada peningkatan moderenisasi alusista yang dikhususkan kepada matra udara, karena dalam beberapa tahun terakhir tidak terjadi peningkatan yang cukup signifikan alusista matra udara.

Maka dari itu, dalam MEF pemerintah Indonesia sebagai aktor rasional dalam moderenisasi alusista melihat beberapa peluang atau pilihan-pilihan strategis kerjasama internasional dengan negara industri alutsista modern. Dalam hal ini dapat dianalisis sebagai berikut:

Tabel. 1.1 Analisis pilihan alternative dalam kerjasama dalam bidang pertahanan

	Amerika Serikat	Rusia
Keuntungan	<ul style="list-style-type: none"> - Moderenisasi teknologi industri militer . - <i>Transfer of Technology</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Transfer of Technology</i> - Biaya perawatan alusista yang sangat murah melalui Manintanance, Repair and Overhaul (MRO) - Skema Imbal Dagang

¹¹ Rusman, "Pentingnya Minimum Essential Force sebagai strategi kebijakan Pertahanan Indonesia" sumber: theglobal-review.com diakses pada tanggal, 28 Februari 2018

Konsekuensi/ kerugian	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrak politik pada setiap kerjasama militer. - Biaya perawatan alusista yang sangat mahal. 	- Harga Alusista yang cukup mahal.
--------------------------	---	------------------------------------

Berdasarkan tabel diatas dalam menentukan pilihan rasional, strategi kerjasama yang paling rasional untuk mendukung kepentingan nasional Indonesia dalam modernisasi alusista adalah menjalin kerjasama dengan Rusia. Kedua negara memiliki keuntungan ToF (*Transfer of Technology*) akan tetapi tawaran perjanjian perdagangan alusista dengan Rusia lebih menguntungkan karena adanya mekanisme baru dalam perjanjian Indonesia-Rusia. Mekanisme baru tersebut terjalin melalui Skema Imbal dagang dan MRO. Skema Imbal dagang merupakan pola yang diterapkan oleh pemerintah dengan mewajibkan eksportir negara mitra dagang untuk membeli produk dalam negeri, dinilai mampu untuk meningkatkan ekspor serta membuka pasar-pasar baru tujuan ekspor. Sedangkan MRO merupakan mekanisme kerjasama pengadaan alusista dimana Rusia sebagai negara eksportir alusista memberikan bantuan perawatan, perbaikan, pemeriksaan alusista kepada Indonesia sebagai negara importir.

Pemertintah Jokowi memiliki kepentingan untuk memodernisasi industri pertahanan dengan membeli Sukhoi SU-35 guna untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan negara dimana dari hasil kerjasama Indonesia mendapatkan berbagai keuntungan seperti adanya *Transfer of Technology* yang diberikan dari pembelian Alutsista sedang Rusia sangat terkenal dengan negara pembuat senjata yang mumpuni. Sedangkan, pada kepentingan ekonomi, Indonesia melakukan imbal dagang yang memberikan potensi ekspor ke Rusia sebanyak 50% dari nilai pembelian Sukhoi tersebut.

Maka dari itu, kerjasama Rusia- Indonesia merupakan salah satu pilihan yang sangat rasional bagi Pemerintah Indonesia. Dimana dengan adanya kedua mekanisme tersebut, Indonesia dapat memaksimalkan pencapaian tujuan nasional yaitu peningkatan, penguatan, modernisasi alusista.

b. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan konsep yang paling dikenal luas dikalangan para penstudi hubungan internasional dan politik internasional baik itu pengamat aliran tradisional atau saintifik. Hal ini terjadi selama Negara bangsa (*Nation State*) masih merupakan aktor yang utama dalam hubungan internasional. Semua ahli agaknya sepakat bahwa determinan utama yang menggerakkan negara-negara menjalankan hubungan internasional (*international relation*) adalah kepentingan nasionalnya.¹²

Paul Seabury mendefenisikan “kepentingan nasional secara *deskriptif* dan *normatif*. Secara *deskriptif* kepentingan nasional adalah tujuan yang harus dicapai oleh suatu bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah. Sedang secara *normative* kepentingan nasional adalah kumpulan cita-cita suatu bangsa yang berusaha dicapainya dengan berhubungan dengan Negara lain”.

George F. Kennan (1951) memahami makna konsep kepentingan nasional (*national interest*) dalam hubungan antarnegara. Kennan membuat definisi konsep ini secara negatif tentang apayang tidak termasuk ke dalam pengertian kepentingan nasional. *Pertama*, konsepsi kepentingan nasional bukan merupakan kepentingan yang terpisah dari lingkungan

¹² T.May Rudy, 2002, Study Strategis dalam transformasi sistem Internasional Pasca Perang Dingin, Refika Aditama, Bandung, hlm. 60.

pergaulanantarbangsa atau bahkan dari aspirasi dan problematika yang muncul secara internal dalam suatu Negara. Kepentingan nasional suatu bangsa dengan sendirinya perlu mempertimbangkan berbagai nilai yang berkembang dan menjadi ciri negara itu sendiri. KJ Holsti mengidentifikasi kepentingan nasional kedalam hal yaitu:

1) *Middle-Range Objectives*: Kebutuhan memperbaiki derajat perekonomian,

Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Rusia menjadikan perekonomian Indonesia dapat meningkat, Rusia adalah mitra dagang Indonesia ke-24 pada tahun 2016. Nilai total perdagangan Indonesia–Rusia tahun 2016 tercatat USD 2,11 miliar, dan Indonesia mendapat surplus USD 410,9 juta yang seluruhnya berasal dari surplus sektor nonmigas. Ekspor nonmigas Indonesia tercatat USD 1,26 miliar, sedangkan impor nonmigas Indonesia dari Rusia tercatat USD 850,6 miliar. Adapun perkembangan ekspor nonmigas Indonesia ke Rusia tahun 2012-2016 tercatat positif 8,5%.¹³

2) *Long-Range Objectives*: Sesuatu yang bersifat ideal misalnya keinginan mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia.¹⁴

Hubungan kerjasama antara Rusia dan Indonesia menjadikan Indonesia tidak dipandang sebelah mata oleh negara-negara lainnya, sehingga Indonesia memiliki *power* untuk mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia.

¹³ Kementerian Perdagangan, *Skema Imbal Beli SU-35 Indonesia-Rusia, Tingkatkan Pertahanan dan Ekspor Nasional*, diakses melalui <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2017/08/22/skema-imbali-beli-su-35-indonesia-rusia-tingkatkan-pertahanan-dan-ekspor-nasional-id0-1503387781.pdf> pada 22 Agustus 2017

¹⁴ Lihat KJ Holsti, 1981, *International Politics : Framework for Analysis*, New Delhi : Prentice-Hall of India.

Sedangkan disisi lain Dadelford dan Lincoln (1962) berpendapat bahwa kepentingan nasional suatu bangsa meliputi,kepentingan keamanan nasional, kepentingan pengembangan ekonomi, kepentingan peningkatan kekuatan nasional, kepentingan prestise nasional.

Dari semua pendapat para ahli tersebut dapat ditarik satu kesimpulan bahwa kepentingan nasional itu berpusat pada perlindungan diri (*Selfpreservation*) sebuah bangsa. Dewi Fortuna Anwar dalam orasi ilmiahnya sebagai staff ahli peneliti LIPI memberi keterangan tentang kepentingan nasional secara kontradiktif, disatu sisi secara objektif bahwa kepentingan nasional bisa didefenisikan secara jelas dengan kriteria yang objektif dan cenderung konstan dari waktu ke waktu. Disisi lain kepentingan nasional bisa diartikan subjektif, artinya kepentingan nasional selalu berubah mengikuti preferensi subjektif para pembuat keputusan.

c. Konsep Keputusan Politik Luar Negeri

Kepentingan nasional merupakan kunci dalam politik luar negeri. Menurut Columbis dan Wolfe, politik luar negeri merupakan sintesis dari tujuan atau kepentingan nasional dengan powerdan kapabilitas (Coulombis dan Wolfe, 126). Oleh karena kesamaan itu kepentingan nasional lazim diidentikkan dengan tujuan nasional (national goals) namun untuk hal-hal lainnya bisa saja berubah dalam jangka waktu tertentu.Contohnya kepentingan ekonomi atau kepentingan pengembangan sumber daya manusia.¹⁵

Tujuan dari politik luar negeri adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional. Tujuan tersebut memuat gambaran atas keadaan negara dimasa yang akan

¹⁵ R Soeprapto, 1997, *Hubungan Internasional, Sistem perilaku dan interaksi*, Grapindo Media Persada, Jakarta, hlm. 118.

datang dan kondisi masa depan yang diinginkan Pemerintah negara menetapkan berbagai sarana yang diusahakan untuk dicapai dengan melakukan berbagai tindakan yang menunjukkan adanya kebutuhan, keinginan dan tujuan.

Landasan politik luar negeri Indonesia adalah UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Hal ini berarti bahwa pasal-pasal UUD 1945 mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara memberikan garis-garis besar dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Sedang falsafah hidup bangsa, yaitu Pancasila menjadi landasan idiil dalam politik luar negeri RI.¹⁶

Prinsip Polugri (politik luar negeri) dapat dilihat secara jelas dalam pembukaan UUD 1945 yang menjadi acuan bagi pengamalan Polugri Indonesia. Hal ini juga diperjelas oleh Moh Hatta dalam pidatonya yang berjudul 'Mendayung antara dua karang' yang merupakan penjelasan perdana dan pengenalan nama politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang dinyatakan di depan badan pekerja KNIP pada 2 september 1948.

Apakah bangsa Indonesia yang memerjuangkan kemerdekaan harus memilih saja antara pro Rusia dan pro Amerika? apakah tidak ada pendirian lain yang harus diambil dalam mengejar cita-cita bangsa? pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil ialah supaya Indonesia jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional melainkan ia harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri.... Polugri RI harus ditentukan oleh kepentingannya sendiri dan dijalankan menurut keadaan dan kenyataan yang kita hadapi..... garis-garis politik Indonesia tidak dapat ditentukan oleh haluan politik

¹⁶ Athiqah Nur Alami, Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri dalam Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik.

negara lain yang berdasarkan kepada kepentingan negara itu sendiri.¹⁷

Pelaksanaan politik luar negeri suatu negara didahului oleh penetapan kebijaksanaan dan keputusan serta harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor nasional sebagai faktor internal dan faktor-faktor internasional sebagai faktor eksternal. Disamping itu dalam pelaksanaan politik luar negeri harus dipilih teknik maupun instrumen yang cocok untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan:

Dengan mengacu pada pendapat Rosenau, Coulumbis dan Wolfe (Coulumbis dan Wolfe: 129-137). Ada beberapa variabel yang berpengaruh terhadap politik luar negeri sebuah negara variabel tersebut antara lain:¹⁸

a. Variabel Ideosinkretik.

Berkaitan dengan image dan karakter pribadi pembuat keputusan, antara lain mengenai ketenagaan lawan, ketergesaan, kemarahan lawan prudensi, ketakutan lawan, percaya diri sendiri. Intinya karakteristik psikologis para pemimpin pembuat keputusan, demikian juga para pelaksana politik.

b. Variabel Peranan

Biasanya didefenisikan sebagai aturan-aturan perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan pekerjaannya. Seseorang yang memegang peranan spesifik, hasil prilakunya dimodifikasi oleh harapan dan ekspektasi publik.

¹⁷ Mohammad Hatta, 1976, Cet Pertama Mendayung Antara Dua Karang, Jakarta: Bulan Bintang, Hal 17. Lihat juga Mohammad Hatta, 1953, Indonesia Foreign Policy: Folicy Affairs, hlm. 444.

¹⁸Ibid.

- c. Variabel birokratis
Menyangkut struktur dan proses pemerintahan serta efeknya terhadap politik luar negeri. Menurut Allison kompleksitas birokratis merupakan karakteristik yang terdapat hampir semua negara terbelakang.
- d. Variabel Nasional
Mencakup berbagai atribut nasional yang mempengaruhi hasil politik luar negeri.

E. Hipotesa

Indonesia melakukan kerjasama militer dengan Rusia dalam pengadaan Alutsista pada pemerintahan Jokowi karena dua alasan sebagai berikut:

- a. Kepentingan pertahanan dan politik, untuk memodernisasi Alutsista pertahanan Indonesia dengan adanya keuntungan *Transfer of Technology*
- b. Kepentingan ekonomi, untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dengan kerjasama imbal dagang.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini dibatasi pada hubungan kerjasama politik luar negeri Indonesia dan Rusia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam bidang pertahanan militer terhadap pengadaan alat utama sistem senjata.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model eksplanatif analisis, yaitu bersifat menjelaskan secara rinci pokok permasalahan dan menjelaskan secara keseluruhan variabel-variabel hasil yang telah diamati berdasarkan pada kerangka pemikiran yang digunakan dalam

penelitian ini yang lebih ditekankan pada politik luar negeri Indonesia terhadap rusia dalam bidang pertahanan militer pada masa pemerintahan Joko Widodo periode 2014-2019. Sasarannya adalah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan apa, bagaimana dan mengapa terhadap kejadian dan fakta dalam politik internasional.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data-data yang berasal dari jurnal ilmiah, dokumen-dokumen, surat-surat kabar atau buku-buku dan pernyataan dalam konferensi-konferensi pers yang berkaitan dengan tema penelitian tentang politik luar negeri Indonesia dan pertahanan militer pada masa pemerintahan Joko Widodo tahun 2014-2019.

3. Analisis Data

Setelah data dan fakta yang diperlukan diperoleh maka langkah selanjutnya yaitu menganalisis data sesuai dengan fakta-fakta yang dihadirkan dalam penelitian untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I akan dibahas latar belakang penelitian, manfaat tujuan, teori dan konsep-konsep yang melandasi penelitian serta metodologi yang dipakai dalam penelitian.

BAB II SEJARAH HUBUNGAN INDONESIA DAN RUSIA

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai sejarah, geografis dan hubungan kerjasama diantara kedua Negara tersebut.

BAB III ALASAN INDONESIA MELAKUKAN KERJASAMA MILITER DENGAN RUSIA

Pada bab ini akan dibahas mengenai kerjasama

dibidang militer, politik dan ekonomi antara Indonesia-Rusia dan kesepakatan perjanjian dibidang militer antara pemerintah Indonesia-Rusia dalam hal pengadaan Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata).

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.